

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ruslan. 2013. *Teori dan Panduan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Ahmad Redi. 2017. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2020. *Perbuatan Hukum Pemerintahan*. Phinatama Media. Makassar.
- Gede Marhaendra Wija Atmaja. 2016. *Ilmu Perundang-Undangan*. Buku Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mitra Buana Media. Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perihal Undang-Undang*. RajaGrafindo. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mohammad Mahrus Ali. 2019. *Tafsir Konstitusi: Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Muhammad Junaidi. 2018. *Hukum Konstitusi Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Rajawali Pers. Depok.
- Putera Astomo. 2018. *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan praktik di Indonesia*. Grafindo Persada. Depok.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada. Depok.
- Yuliandri. 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

## Jurnal

- Aan Eko Widiarto, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi Volume 16, Nomor 1, Maret 2019
- Adhi Setyo Prabowo. "Politik Hukum Omnibus Law", Jurnal Pamator, Volume 13 Nomor 1, April 2020.
- Ali Marwan SHB dan Elvin Martha Julianthy, "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 15 Nomor 2, Juli 2018.
- Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Volume 16 Nomor 1, 2019.
- Evi Noviawati, "Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Volume 6 Nomor 1, 2018.
- Fajar Laksono Soeroso, Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yudisial Volume 6 Nomor 3, 2013
- Johansyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*Binding*)", Volume 19 Nomor 2, Mei 2021.
- Malik Anwar dan Wulan Chorry Shafira, "Anomali Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil Uu Cipta Kerja", Jurnal Rechtsvinding Volume 11 Nomor 1, 2022.
- Nila Erdiana, Budi Santoso, Mujiono Hafidh Prasetyo, "Eksistensi Bank Tanah Terkait Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja" Jurnal NOTARIUS, Volume 14 Nomor 2, 2021.
- Prischa Listiningrum, "Eksistensi dan Kedudukan Peraturan Presiden dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", Jurnal Arena Hukum, Volume 12 Nomor 2, 2019.
- Ranitya Ganindha, Urgensi Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah Sebagai Alternatif Penyediaan Tanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum, 2016.

Retno Saraswati, "Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Volume IX, Nomor 2, April-Juni 2009.

Rahayu Prasetyaningsih "Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945" *Jurnal PJIH* Volume 4 Nomor 2, 2017.

Rizal Irvan Amin, "Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 15 Nomor 2, 2020.

Suryati, Ramanata Disurya, Layang Sardana, "Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal SIMBUR CAHAYA*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Wicipto Setiadi, "Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1 Nomor 1, 2012.

Widy Angga Windyantoro dan Frans Simangunsong, "Analisis Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Perpres No.113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah", *Jurnal Abdikarya: Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa dengan judul penelitian* Volume 5 Nomor 1, 2022.

Yhannu Setyawan, "Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, Volume 7(1), 2020.

Yosephus Mainake, "Uji Formil UU KPK Oleh Mahkamah Konstitusi", *Isu Sepekan Bidang Hukum*, Mei 2021.

### **Internet**

Ardiansyah Fadli, "Sah, Badan Bank Tanah Resmi dibentuk, Ini Susunannya", *Kompas.com*, 20 Maret 2022

Ady Thea DA, "Pengabaian Putusan MK Bentuk Pembangkangan Konstitusi? Simak Penjelasannya", *Hukumonline*, 3 februari 2022.

Bantuan Hukum, "Hukum Dasar dan Dasar Hukum", *Artikel Online*, 24 Maret 2022

Eri Susanto, "Bank Tanah untuk Keadilan", 20 April 2022

Nafiatul Munawaroh, *Begini Proses Penyusunan Peraturan Presiden*, HukumOnline, 12 Juli 2022

Joseph Raz, *“Legal Validity”*, Oxford Scholarship online, 13 April 2022

Herdi Alif Al Hikam, *“Modal Bank Tanah Kurang Rp 1,5 Triliun, Nambahnya dari Mana?”*, Detik.com, 02 Juni 2022

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Badan Bank Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 25 November 2021